

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara *core* di Asia Tenggara dengan *branding* pariwisata yang berhasil tidak akan lepas dari sebuah negara bernama Thailand. Mayoritas masyarakatnya merupakan pemeluk agama Buddha, di mana ajarannya menekankan pada kebaikan, keterbukaan, dan kepasifan. Sebab itu masyarakatnya cenderung santai dan ramah. Semangat dan identitas nasionalnya juga sangat kuat mengakar dalam masyarakat, namun mereka jarang mengekspresikannya dalam bentuk nasionalisme yang penuh kekerasan dan perilaku anti-asing (*anti-foreign*). Karenanya, lingkungan budaya Thailand kondusif terhadap pariwisata (Elliott, 1983).

Pada 2006, negara ini berada di posisi ke-13 dalam penerimaan pariwisata internasional. Hal ini berkontribusi pada cadangan devisa negara, merangsang produksi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya dari sektor-sektor terkait lainnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan status ekonomi negara (McDowall & Wang, 2009). Namun apabila melihat dari fenomena sosial dan transnasional yang terjadi, negara ini memiliki beberapa permasalahan.

Fenomena transnasional yang menjadi mayoritas di Asia Tenggara adalah migrasi, di mana sejak 1980-an tingkat migrasi intra-regional terus meningkat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di Asia Tenggara, mendorong orang-orang dari negara yang kurang beruntung dalam bidang ekonomi untuk melakukan migrasi, baik dari orang-orang yang mempunyai *skill* maupun tidak. Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam adalah negara-negara yang

menjadi destinasi migrasi. Sedangkan Myanmar, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Filipina, dan Vietnam menjadi negara sumber pengirim tenaga kerja (Larsen, 2010).

Menurut Jacqueline Joudo Larsen, ada beberapa karakteristik fenomena migrasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara yaitu 1) 'Feminisasi' migrasi tenaga kerja. Artinya, pekerja telah didominasi oleh perempuan; 2) *Undocument Migration*; 3) Terjadinya eksploitasi pekerja, 4) *Protections in sending and receiving countries* (Larsen, 2010).

Permasalahan migrasi ini membawa efek sosial seperti kejahatan transnasional, keamanan, penyakit menular, HIV/AIDS, perdagangan narkoba, dan juga perdagangan manusia (Sarāwut Phaithūnwong & Yongyuth Chalamwong, 2012). Wilayah Asia Tenggara terkenal sebagai sumber orang-orang yang diperdagangkan, baik sebagai tempat transit, negara pengirim, maupun menjadi destinasi tujuan. Secara intra-regional, Thailand menjadi tempat destinasi tertinggi perdagangan manusia (Larsen, 2010), dengan mayoritas berasal dari negara-negara tetangganya seperti Lao PDR, Kamboja, Myanmar (Caballero & Anthony, 2018).

Untuk membahas Thailand dengan segala permasalahannya terutama masalah non-tradisional, khususnya perdagangan manusia di masa kini, perlu kiranya untuk melihat jauh ke belakang apakah hal yang membuat negara ini dapat menjadi jantung dari perdagangan manusia di Asia Tenggara. Banyak faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari sejarah, kultur sosial yang akan mendorong pada fenomena eksploitasi seks, dan dinamika pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional. Tulisan ini akan lebih berfokus pada fenomena ekonomi yang terjadi dengan cakupan yang lebih kecil dari regional, yaitu sub-regional atau

sub-kawasan. Maka dari itu, perlu untuk membahas bagaimana sub-kawasan ini terbentuk.

Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang berada di antara China, India, Australia, dan Samudera Pasifik. Wilayah ini dapat dibagi menjadi dua wilayah geografi. Yang pertama adalah *Mainland Southeast Asia* atau Asia Tenggara daratan yang terhubung dengan China dan India, membentang ke selatan pada apa yang disebut Semenanjung Indochina. Wilayah ini mencakup Vietnam, Lao PDR, Kamboja, Burma (Myanmar), dan Thailand. Yang kedua adalah wilayah Asia Tenggara kepulauan, berada di wilayah Selatan dan ke Timur yang dikelilingi oleh perairan. Wilayah ini mencakup Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Timor-timor (Berglee, 2012).

Tiga sungai terpanjang di dunia ada di Asia Tenggara, tepatnya di Asia Tenggara daratan. Mereka adalah Sungai Mekong, Sungai Red, dan Sungai Irrawaddy yang berhulu di Pegunungan Himalaya di China (Berglee, 2012). Sungai Mekong adalah salah satu sungai dengan sistem sungai yang paling kompleks di dunia. Bermula dari Dataran Tinggi di Tibet China, mengalir ke Myanmar, lalu ke Republik Demokratik Rakyat Lao (Lao PDR), ke Thailand, dan ke Kamboja, mengalirkan aliran air sungai sekitar 795.000 km² menuju laut melalui Delta Mekong di Vietnam dekat Kota Ho Chi Minh (Saigon City) dengan aliran rata-rata ~15.000 km³ /tahun (Pokhrel et al., 2018).

Berdasarkan geografi sungai ini, terbentuk apa yang disebut dengan Sub-kawasan Mekong Raya atau *Greater Mekong Subregion (GMS)*, yaitu sebuah sub-kawasan di dalam Asia Tenggara yang terdiri dari negara-negara yang dilewati oleh Sungai Mekong, di antaranya Republik Rakyat China (Provinsi Yunan dan Daerah

Otonomi Guangxi Zhuang – yang masuk pada tahun 2005), Republik Demokratik Rakyat Lao (Lao PDR), Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Vietnam (Greater Mekong Subregion, 2021b). Daerah ini mencakup populasi lebih dari 316 juta orang (lebih besar dari Amerika Serikat), luas tanah sekitar 2,6 juta km² (kira-kira seukuran Eropa), menikmati basis pertanian yang kaya, sumber daya mineral dan energi yang cukup besar (terbarukan dan tidak terbarukan), dan lokasi yang strategis di jantung Asia di antara ekonomi yang sedang berkembang yaitu Cina dan India (Omkar L. Shrestha & Chongvilaivan, 2013).

Karena potensi yang dimiliki, kemudian pada 1992, keenam negara tersebut, mendapatkan dukungan dari *Asian Development Bank* (ADB) yang memperkenalkan program kerjasama subregional GMS untuk meningkatkan hubungan ekonomi mereka yang hingga kini mencakup 10 prioritas sektor: Agrikultur, energi, lingkungan, kesehatan, sumber daya manusia, *information and communication technology* (ICT) atau teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, transportasi, fasilitas transportasi dan perdagangan, pembangunan perkotaan (Greater Mekong Subregion, 2021a). Kerja sama ekonomi bagi wilayah maupun sub-wilayah maju dengan infrastruktur yang memadai, dengan contoh negara maju seperti Kanada dan Amerika Serikat, di mana perdagangan kawasan bisa dilakukan dengan menghilangkan hambatan perdagangan (*trade barriers*) (Than, 2002). Namun negara-negara GMS memiliki latar belakang yang berbeda mulai dari ekonomi dan politik, sehingga tidak bisa langsung melakukan pembukaan pasar bebas.

Tiga negara di *Greater Mekong Subregion* – Kamboja, Lao PDR, dan Myanmar, sebelumnya diklasifikasikan sebagai negara terbelakang oleh sistem PBB,

mencerminkan bahwa perkembangan ekonomi mereka relatif buruk. Adapun Vietnam yang telah terlibat dalam berbagai perang, membutuhkan waktu yang lama untuk pembangunan ekonomi yang tepat. Begitu pula Provinsi Yunnan di China yang terletak di sudut Barat Daya China, jauh dari area pesisir ekonomi yang makmur, juga tidak banyak diuntungkan dari keterbukaan reformasi ekonomi, dan sama seperti Lao PDR, Yunnan adalah kawasan terkunci yang tidak memiliki akses ke laut. Dibandingkan negara GMS lainnya, Thailand adalah satu-satunya negara kapitalis di sub-kawasan dengan *track* perkembangan ekonomi yang baik (Krongkaew, 2004).

Oleh karena itu, pembangunan “*hardware*” lebih penting daripada “*software*” nya, artinya peningkatan infrastruktur dipandang sebagai prasyarat yang sangat penting untuk mencapai integrasi pasar yang diharapkan. Inilah alasan utama mengapa proyek-proyek infrastruktur besar mendapat hak istimewa di bawah Program GMS terutama untuk negara-negara terbelakang (Oehlers, 2006).

Di antara negara-negara di GMS, Thailand adalah negara yang paling maju dalam bidang ekonominya. Semua ekonomi dalam kawasan itu berfokus pada agrikultural terkecuali Thailand. Secara struktur ekonomi, Thailand dan Yunnan lebih bersifat industrialis daripada yang lainnya. Semua negara di kawasan tersebut dalam masa transisi menuju ekonomi pasar, namun Thailand sudah menganut ekonomi pasar selama ini. Selain faktor tersebut, kesenjangan ekonomi yang terjadi antara Thailand dengan negara GMS lainnya tidak terlepas dari keadaan internal negara tersebut. Setidaknya Thailand mengalami empat periodisasi transisi ekonomi: *Pre-boom* (1970-1986), *boom* (1987-1996), krisis (1997-1999), dan *recovery* (2000-2008) (Yusoff & Nuh, 2015). Pada saat Thailand mengalami *economic*

boom yang dimulai pada tahun 1990, hal ini yang akan memicu migrasi orang-orang di negara-negara GMS ke Thailand untuk mencari pekerjaan (Kranrattanasuit, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat, kekurangan tenaga kerja, dan populasi yang menua di negara tujuan, kedekatan geografi, dan dibangunnya jaringan migrasi, semua itu adalah faktor pendorong orang-orang di Kamboja, Myanmar, Lao PDR, dan Vietnam untuk mencari pekerjaan di luar negaranya (Marks & Olsen, 2015). Secara dominan migrasi yang melewati perbatasan negara dilakukan oleh orang-orang miskin dengan Thailand sebagai negara destinasi utama (Latt, 2013).

Terhitung pada Maret 2002, migran yang terdaftar oleh pemerintah Thailand adalah 348.747 orang Myanmar, 42.085 orang Lao PDR, dan 37.595 orang Kamboja. Namun, *Research Centre for Migration* (ARCM) Universitas Chulalongkorn memperkirakan jumlah migran sebenarnya 2,5 sampai 3 kali lebih besar daripada yang terdaftar di pemerintah, yaitu sekitar 1,07 – 1,28 juta orang. Thailand sendiri juga merupakan negara pengekspor migran tenaga kerja dengan perkiraan sekitar 200.000 orang di lebih dari 20 negara, namun orang-orang di Thailand tidak pergi ke negara intra-GMS, melainkan pergi ke destinasi luar GMS yang lebih kaya seperti Taiwan, Jepang, Singapura, Brunei, Malaysia, Hong Kong, dan negara Timur Tengah. Sementara, Thailand menjadi negara destinasi di *Greater Mekong Subregion* (Asian Migrant Centre & Mekong Migration Network, 2002).

Saat krisis 1997, Thailand memiliki jumlah pengangguran yang besar dan mencapai puncaknya pada 1998. Meski begitu, beberapa lapangan pekerjaan masih mengalami kekurangan tenaga kerja seperti yang bergaji rendah dan termasuk

“pekerjaan 3-D” (*dirty, dangerous, disdained*) pekerjaan kotor, berbahaya, diremehkan atau (*dirty, dangerous, difficult*) pekerjaan kotor, berbahaya, dan sulit (Kranrattanasuit, 2014). Pekerjaan 3-D itu diantaranya perikanan, pekerjaan pengolahan makanan laut, peternakan, konstruksi, dan transportasi gudang. Para migran mengisi pekerjaan 3-D dikarenakan orang Thailand sendiri banyak yang menghindari pekerjaan ini (Asian Migrant Centre & Mekong Migration Network, 2002).

Salah satu sektor dari GMS program yang membahas migran adalah sektor *Human Resource Development* atau sumber daya manusia. Namun perlu diingat bahwa *Asian Development Bank* (ADB) menghindari beberapa isu migran seperti hak, perlindungan, dan status legal. Meski begitu, seluruh pemerintah GMS dapat bekerjasama dalam permasalahan perbudakan dan perdagangan manusia, serta pengontrolan penyakit (Latt, 2013). Meski begitu, tidak ada data yang pasti mengenai jumlah perdagangan manusia karena banyaknya migrasi lintas batas yang ilegal dan tidak terdeteksi. Sub-kawasan ini memiliki beberapa bentuk perdagangan manusia seperti perbudakan di kapal penangkapan ikan, perbudakan pada pekerjaan domestik, dan pekerja seks.

Keenam negara tersebut sadar bahwa permasalahan perdagangan manusia ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Sehingga pada 29 Oktober 2004 di Yangon, Ibukota Myanmar, keenam pemimpin negara *Greater Mekong Subregion* menandatangani sebuah *MoU on Cooperation against Trafficking in Person in the Greater Mekong Subregion* yang akan dilanjutkan pada pembentukan *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT) (McMichael & Healy, 2017).

MoU itu berisikan bahwa keenam negara secara resmi menyadari bahwa perdagangan manusia ada kaitannya dengan permintaan tenaga kerja eksploitatif dan layanan seks, adanya keterlibatan anggota masyarakat dan kelompok kriminal terorganisir, serta perlunya respon keadilan dan pentingnya peran lembaga dalam pencegahan perdagangan manusia, perlindungan terhadap korban, dan penuntutan terhadap pelaku (Torres & Swanström, 2014). Program utama yang diterapkan COMMIT adalah *Sub-regional Plan of Action* (SPA) yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2005, SPA II pada 2008, SPA III pada 2011 (Asian Migrant Centre & Mekong Migration Network, 2013). Kemudian pada 2015, SPA IV dirilis.

Thailand memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Negara ini menjadi pengharapan bagi negara-negara tetangganya untuk kehidupan yang lebih baik, namun di sisi lain pertumbuhan ekonominya juga telah menciptakan ruang baru untuk eksploitasi. Masalah perdagangan manusia di Thailand menjadi semakin kompleks dengan adanya proyek kerjasama ekonomi tingkat sub-kawasan yaitu *Greater Mekong Subregion* yang didukung oleh *Asian Development Bank* sebelumnya.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul “**Upaya Thailand dalam Menanggulangi Kasus Perdagangan Manusia Melalui Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT)**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut
“Bagaimana Thailand Mengimplementasikan Program *Coordinated Mekong Ministerial Against Trafficking (COMMIT)* dalam Menanggulangi Kasus Perdagangan Manusia di Negaranya”

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu, penelitian ini akan dibatasi dari tahun 2018 – 2022 sesuai dengan syarat penelitian yaitu harus berjarak 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan gambaran tentang hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini diantaranya

1. Mengetahui bagaimana proyek ekonomi *Greater Mekong Subregion* dapat menjadi peluang dalam perdagangan manusia di Thailand.

2. Mengetahui bagaimana implementasi *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* dalam menanggulangi perdagangan manusia di Thailand.
3. Mengetahui hambatan dari pengimplementasian *Subregional Plan of Action IV* dalam menangani perdagangan manusia pada rentan waktu 2018-2022.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan tujuan penelitian, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulis berharap skripsi ini dapat ikut berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan Prodi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pasundan.
- b. Sebagai sumber referensi terkait salah satu isu non-tradisional Hubungan Internasional yaitu kejatahan perdagangan manusia khususnya di Thailand.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bacaan dan pengetahuan mengenai perdagangan manusia di Thailand, khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat.
- b. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.